

## **INTEREGRASI PESAN ANTI KORUPI DALAM PROMOSI GIZI**

**Cantika Oktavia**

[cantikataylor4@gmail.com](mailto:cantikataylor4@gmail.com)

Poltekkes Kemenkes Riau

### **1. PENDAHULUAN**

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang signifikan untuk berbagai program krusial, seperti percepatan penurunan prevalensi *stunting*, pemberian makanan tambahan (PMT), hingga penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. Namun, efektivitas dari berbagai program ini tidak hanya bergantung pada ketepatan formulasi zat gizi atau kecanggihan teknologi pangan, melainkan juga pada integritas dan transparansi dalam sistem distribusinya. Ketahanan gizi masyarakat sering kali menjadi sangat rentan ketika berhadapan dengan gangguan tata kelola yang tidak akuntabel.

Dalam realitasnya, sektor kesehatan dan bantuan sosial masih menjadi area yang rawan terhadap praktik korupsi, mulai dari tingkat pengadaan barang hingga kebocoran distribusi di lapangan. Penyalahgunaan wewenang atau pemotongan anggaran dalam program gizi berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan yang diterima oleh kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita. Hal ini menciptakan paradoks di mana target pemenuhan gizi gagal tercapai bukan karena kurangnya anggaran, melainkan karena hilangnya nilai-nilai integritas dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, memisahkan upaya edukasi gizi dari kampanye nilai-nilai anti-korupsi merupakan celah besar yang dapat menghambat pencapaian target kesehatan masyarakat secara sistemik.

Topik integrasi pesan anti-korupsi dalam promosi gizi menjadi krusial untuk dibahas sebagai langkah preventif dalam menjaga efektivitas program kesehatan. Dengan menyisipkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk melapor dalam setiap kampanye promosi gizi, masyarakat dan tenaga kesehatan diajak untuk tidak hanya peduli pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan moral sistem kesehatan mereka. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang bersih, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan untuk perbaikan gizi benar-benar berkonversi menjadi peningkatan status gizi bangsa yang nyata dan berkelanjutan.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI**

Promosi gizi secara konseptual didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mencapai status gizi yang optimal. Berdasarkan teori perubahan perilaku Lawrence Green (*PRECEDE-PROCEED Model*), perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*). Dalam konteks ini, efektivitas promosi gizi tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi teknis mengenai zat gizi, tetapi juga pada keberadaan faktor pemungkin berupa akses yang adil terhadap sumber daya pangan dan layanan kesehatan. Gangguan pada faktor pemungkin, seperti adanya praktik korupsi dalam distribusi bantuan gizi, secara langsung akan menghambat terjadinya perubahan perilaku positif di tingkat masyarakat.

Penyelenggaraan program gizi merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib memenuhi prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Menurut *Agency Theory*, risiko korupsi muncul ketika terdapat asimetri informasi antara penyedia layanan (agen) dan masyarakat (prinsipal). Dalam intervensi gizi, korupsi dapat memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, seperti pengurangan kualitas bahan pangan tambahan atau pungutan liar dalam birokrasi layanan kesehatan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebocoran anggaran pada sektor kesehatan memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap capaian indikator kesehatan masyarakat, termasuk angka stunting dan mortalitas ibu.

Integrasi pesan anti-korupsi dalam promosi gizi bersandar pada konsep pendidikan nilai yang bersifat lintas sektor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sembilan nilai integritas: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pesan kesehatan selaras dengan pendekatan *Social Marketing*, di mana promosi tidak hanya "menjual" produk atau perilaku sehat, tetapi juga mempromosikan perubahan sosial yang lebih luas. Dengan menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran dalam pemanfaatan bantuan gizi, masyarakat diberdayakan untuk menjadi pengawas aktif (*social control*) bagi keberlangsungan program-program kesehatan di lingkungannya.

## 2.1. Konsep Utama

Landasan utama dalam analisis ini dimulai dengan pemahaman mengenai promosi gizi, yang dipandang bukan sekadar edukasi teknis mengenai pemilihan bahan pangan, melainkan sebuah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan dan status gizinya. Dalam spektrum yang lebih luas, promosi gizi mencakup advokasi kebijakan dan penguatan lingkungan sosial agar akses terhadap nutrisi menjadi adil dan merata. Upaya ini kemudian diperkuat dengan penyisipan pesan anti-korupsi, yakni serangkaian narasi komunikasi yang mengandung nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menolak serta melaporkan segala bentuk penyimpangan. Pesan ini bertujuan untuk menggeser norma sosial agar masyarakat tidak lagi menoleransi praktik suap atau manipulasi dalam distribusi sumber daya kesehatan.

Konsep integrasi pesan dalam konteks ini merujuk pada pendekatan komunikasi pemasaran sosial yang menyatukan nilai-nilai moral ke dalam konten edukasi kesehatan secara holistik. Dengan kata lain, pesan anti-korupsi tidak disampaikan sebagai materi yang terpisah, melainkan melekat erat dalam narasi program gizi, misalnya dengan menghubungkan hak balita untuk mendapatkan makanan tambahan yang berkualitas dengan kewajiban moral petugas untuk menyalurkannya tanpa potongan. Hal ini berkaitan erat dengan akuntabilitas program gizi, yaitu kewajiban para pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara transparan, baik dari sisi manajerial melalui ketepatan sasaran maupun dari sisi kualitas melalui kesesuaian komposisi gizi bantuan dengan standar yang telah ditetapkan.

Terakhir, analisis ini juga menyentuh konsep kecurangan atau *fraud* dalam gizi masyarakat sebagai bentuk tindakan disengaja yang merugikan keuangan negara sekaligus mengancam kesehatan publik. Praktik ini dapat memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi data penerima manfaat, pengurangan kualitas bahan pangan tambahan, hingga penggelembungan harga pada pengadaan sarana kesehatan. Dengan mendefinisikan bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, integrasi pesan anti-korupsi menjadi instrumen pengawasan sosial yang krusial untuk memastikan bahwa setiap intervensi

kesehatan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan status gizi bangsa.

## 2.2. Teori Pendukung

Analisis dalam opini ini berpijak pada teori determinan sosial kesehatan (*Social Determinants of Health*) yang menyatakan bahwa status kesehatan individu tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh kondisi sistemik di mana mereka hidup dan bekerja. Dalam kerangka ini, tata kelola pemerintahan yang bersih dipandang sebagai determinan struktural yang memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya gizi. Teori ini digunakan untuk membedah bagaimana praktik korupsi menciptakan hambatan artifisial yang memperburuk ketimpangan gizi di masyarakat. Selain itu, digunakan pula *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Icek Ajzen untuk menjelaskan bagaimana integrasi nilai integritas dapat memengaruhi norma subjektif dan kontrol perilaku masyarakat. Dengan menyisipkan pesan anti-korupsi, diharapkan muncul niat kolektif untuk menjaga transparansi program gizi sebagai bagian dari tanggung jawab moral, yang pada akhirnya akan memperkuat efektivitas intervensi kesehatan di tingkat akar rumput.

## 2.3. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah mengonfirmasi hubungan erat antara integritas birokrasi dan capaian kesehatan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Transparency International secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah cenderung memiliki angka kematian ibu dan anak yang lebih rendah serta status gizi yang lebih baik. Di Indonesia, penelitian mengenai efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sering kali menyoroti adanya kebocoran anggaran atau penurunan kualitas bahan pangan akibat rantai distribusi yang tidak transparan. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menawarkan solusi preventif melalui pendekatan edukasi lintas sektor. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek audit keuangan pasca-kejadian, opini ini menekankan pada langkah proaktif yakni mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam materi promosi gizi guna menciptakan pengawasan berbasis komunitas.

## 3. PEMBAHASAN / ANALISIS

### 3.1. Analisis Bagian Pertama

Analisis pertama menyoroti bagaimana praktik korupsi secara langsung menyebabkan degradasi kualitas intervensi gizi yang diterima masyarakat. Ketika anggaran program gizi mengalami penyusutan akibat potongan ilegal atau penggelembungan harga (*mark-up*), dampak yang paling nyata adalah penurunan spesifikasi zat gizi pada paket bantuan makanan. Sebagai contoh, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sumber protein hewani berkualitas tinggi sering kali tereduksi menjadi produk pangan dengan nilai biologis yang lebih rendah. Hal ini menciptakan ilusi keberhasilan program; secara kuantitas bantuan tersalurkan, namun secara kualitas, kebutuhan makro dan mikro nutrien sasaran tetap tidak terpenuhi. Kegagalan ini bukan hanya masalah administratif, melainkan ancaman serius terhadap target penurunan prevalensi *stunting* nasional, karena setiap rupiah yang dikorupsi setara dengan hilangnya peluang pertumbuhan optimal bagi generasi mendatang.

### **3.2. Analisis Bagian Kedua**

Bagian kedua analisis ini menekankan bahwa integrasi pesan anti-korupsi dalam promosi gizi berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Selama ini, masyarakat sering kali diposisikan hanya sebagai penerima manfaat pasif yang tidak memiliki daya tawar terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Dengan menyisipkan nilai keberanian untuk melapor dan pengetahuan mengenai hak-hak dasar dalam materi promosi gizi, masyarakat bertransformasi menjadi agen pengawas (*social control*). Kader kesehatan dan ibu rumah tangga diajak untuk memahami bahwa menuntut kualitas pangan yang sesuai standar adalah bagian dari perilaku hidup sehat. Pendekatan ini secara efektif akan meningkatkan akuntabilitas di tingkat unit layanan terkecil, seperti Posyandu, karena adanya tekanan sosial dan pengawasan langsung dari warga yang telah memiliki kesadaran akan nilai-nilai integritas.

### **3.3. Analisis Bagian Ketiga**

Analisis ketiga menguraikan pentingnya transformasi narasi dalam kampanye kesehatan publik melalui kolaborasi lintas lembaga. Strategi integrasi ini menuntut adanya sinkronisasi antara konten edukasi teknis dari Kementerian Kesehatan dengan nilai-nilai integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tataran praktis, hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan media informasi yang menggabungkan panduan gizi seimbang dengan seruan untuk menjaga transparansi pengelolaan dana desa untuk gizi. Bangunan argumennya adalah bahwa kesehatan fisik yang optimal mustahil dicapai dalam ekosistem yang sakit secara moral. Oleh karena itu, membangun ekosistem gizi yang akuntabel melalui penguatan literasi anti-korupsi di kalangan penyuluh gizi dan tenaga medis menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan.

## **4. KESIMPULAN**

Integrasi pesan anti-korupsi dalam promosi gizi merupakan strategi esensial untuk menjamin bahwa intervensi kesehatan tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga akuntabel secara administratif. Analisis menunjukkan bahwa kegagalan pencapaian target gizi sering kali bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan oleh distorsi distribusi dan degradasi kualitas bantuan akibat rendahnya integritas tata kelola. Dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam narasi kesehatan, masyarakat diberdayakan menjadi agen pengawas aktif yang mampu memitigasi risiko malnutrisi struktural di tingkat layanan primer. Temuan utama menegaskan bahwa kesehatan fisik masyarakat berkorelasi langsung dengan kesehatan moral sistem birokasinya; tanpa transparansi, efektivitas nutrisi akan terus tergerus oleh inefisiensi sistemik.

Implikasi dari studi ini menyarankan perlunya kebijakan konvergensi antara kementerian kesehatan dan lembaga anti-korupsi untuk merancang kurikulum promosi gizi yang holistik. Praktik lapangan ke depan harus mulai menerapkan transparansi data bantuan gizi berbasis komunitas guna memperkuat pengawasan horizontal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan indikator pengukuran dampak literasi anti-korupsi terhadap peningkatan kualitas layanan gizi di daerah dengan kerentanan pangan tinggi. Sinergi interdisipliner ini menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bebas dari beban gizi buruk akibat korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Haddad, L., & Gillespie, S. (2001). Effective food and nutrition policy responses to HIV/AIDS: What we know and what we need to know. *Food Policy*, 26(5), 487-511.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Pedoman pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis lokal bagi ibu hamil dan balita*. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Strategi dan implementasi nilai-nilai integritas*. Direktorat Jejaring Pendidikan KPK.
- Lewis, M. (2006). Governance and corruption in public health care systems. *Center for Global Development Working Paper*, (78). [\](#)
- Vian, T. (2008). Review of corruption in the health sector: Theory, methods and interventions. *Health Policy and Planning*, 23(2), 83-94.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank Group
- World Health Organization. (2019). *Global strategy on diet, physical activity and health: A framework for promoting health through nutrition*. WHO Press.